

ABSTRAK

Vironika Dewi, 1223030121, 2026: Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pengisian Jabatan DPRD Kota Bandung pada Pemilu 2024.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang menjunjung prinsip persamaan hak setiap warga negara dalam kehidupan politik. Untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kebijakan afirmasi berupa keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Meskipun demikian, hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung masih relatif rendah sehingga menarik untuk dikaji berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui minat politik kaum perempuan untuk memenuhi kuota 30% anggota DPRD Kota Bandung. (2) Menganalisis alasan politik dan sosiologis serta yuridis masyarakat dalam memilih calon anggota legislatif perempuan di Kota Bandung. (3) Menganalisis minat politik dan alasan sosiologis serta yuridis perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan teori Siyasah Dusturiyah untuk menganalisis minat politik, alasan sosiologis serta yuridis perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan dalam ketatanegaraan Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber, studi kepustakaan, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Minat politik perempuan dalam memenuhi kuota 30% telah didukung kebijakan afirmasi pada tahap pencalonan, tetapi keterwakilan perempuan yang terpilih hanya mencapai 8 dari 50 kursi atau 16%. (2) Masyarakat memilih calon legislatif perempuan dengan mempertimbangkan kemampuan, kepercayaan, pengalaman, dan keaktifan calon di masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin. (3) Berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah, keterlibatan perempuan dalam politik sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-musāwah* (persamaan), dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan).